Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina	:	Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengarah	:	1. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M. (Penn State Dickinson Law, United States)
Anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*)	:	1. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) 2. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 3. Firdaus S.Sos., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 4. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 5. Oki Wahju Budijanto, S.E., S.H., M.M. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 6. Donny Michael Situmorang, S.H., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 7. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 8. Sabrina Nadilla, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 9. Ganesh Cintika Putri, S.I.P, M.HRL. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM)
Editor Pelaksana (*Managing Editor*)	:	Fitriyani, S.H., M.Si. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM)

Asisten Editor (*Assisstant Editor*)	:	1. B. Lora Christyanti, S.I.P., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 3. Lindung Budi Mulyawan, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 4. Amirah Balqis, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 5. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 6. Mira Sukmawati, S.I.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 7. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Teknologi dan Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Tegar Christopher Yolanda, S.I.P. 9. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Alamat Redaksi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Gedung Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan
PT Pohon Cahaya
Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan:

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritisi serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dikirim melalui Open Journal System (OJS) pada laman ejournal.balitbangham.go.id.

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
PENGANTAR REDAKSI v

Potensi Overkriminalisasi dalam Tindak Pidana Agama: Analisis Kritis Terhadap Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
(*Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis of The Formulation of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023)*) 205-216
Zico Junius Fernando, Sri Wulandari, Panca Sarjana Putra

Penguatan Pemolisian Demokratis dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Analisis Konseptual
(*Strengthening Democratic Policing in the Perspective of Civic Education: A Conceptual Analysis*) 217-234
Mursyid Setiawan, Cecep Darmawan, Muradi, Syaifullah

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik untuk Mewujudkan Tindakan Afirmatif di Kalimantan Selatan
(*Enhancing The Institutional Capacity of Political Parties to Achieve Affirmative Action in South Kalimantan*) 235-250
Ellisa Vikalista, Hardi Warsono, Rina Martini, Dewi Erowati

Gerakan Politik Lokal Waria dalam Perjuangan Hak Bekerja
(*Transgender Local Political Movement In The Struggle For The Right To Work*) 251-266
Ricky Santoso Muharam, Ari Pradhanawati, Fitriyah, Supratiwi

Aksi Kewargaan Membela Hak Ekologi Warga Trenggalek: Analisis Ideologis, Lingkungan, dan Teologis
(*The Acts of Citizenship to Defend Trenggalek Civilians' Ecological Rights: An Ideological, Environmental, and Theological Analysis*) 267-286
Yayum Kumai

BIODATA PENULIS xv

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi ketiga yaitu Jurnal HAM Volume 14 Nomor 3, Desember 2023. Edisi ini, memuat 5 (lima) karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti. Kelima karya tersebut dipublikasikan dalam bahasa asli sesuai pengiriman penulis.

Edisi ini diawali oleh tulisan yang mengulas potensi overkriminalisasi dalam tindak pidana agama pasca perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan kedua menganalisis konsep penguatan pemolisian demokratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Tulisan berikutnya memotret pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik dalam mewujudkan tindakan afirmatif di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, gerakan politik lokal waria dalam perjuangan hak bekerja disajikan dalam tulisan keempat. Dan terakhir, disajikan tulisan berjudul aksi kewargaan membela hak ekologi warga trenggalek.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan Open Jurnal System maupun dari sisi materi tulisan.

Selamat Membaca
-Dewan Redaksi-

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

DEWAN REDAKSI JURNAL HAM MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum
   Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia
2. Prof. Dr. Rianto Adi SH., MA.
   Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Indonesia
3. Prof. Dr. M. Alie Humaedi M. Hum.
   Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
4. Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D
   Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
5. Dr. Aprilina Pawestri, S.H., M.H.
   Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
6. Nurhidayatuloh, SHI., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., MHI
   Faculty of Law, Maastrich University, Netherlands
7. Saru Arifin, S.H., LL.M.
   Constitutional Law and Legislation Study, University of Pecs, Hungary
8. Eko Riyadi, S.H., M.H
   Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Majda El Muhtaj, S.Hum.
   Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Zico Junius Fernando, Sri Wulandari, Panca Sarjana Putra (*Faculty of Law, University of Bengkulu; Faculty of Law, University of 17 Agustus 1945 Semarang; Faculty of Law, Islamic University of North Sumatera*)

(Potensi Overkriminalisasi Dalam Tindak Pidana Agama: Analisis Kritis Terhadap Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru (UU No. 1 Tahun 2023))

Jurnal HAM, Volume 14, Number 3, December 2023, page 205-216

Overcriminalization in the context of criminal law refers to the phenomenon where too many behaviors are defined as criminal offenses, which ultimately results in the expansion of law enforcement powers and an increase in the number of individuals caught up in the criminal justice system. This study examines overcriminalization in the formulation of religious offenses contained in Law Number 1, the Year 2023 on the Criminal Code (KUHP), focusing on Article 302 on incitement of a person to no religion or belief adopted in Indonesia and its impact on atheists or non-religious communities. The analysis highlights several important issues, such as the unclear definition of "inciting" in the article, its impact on freedom of speech, potential discrimination against minorities, and misuse of the law for political purposes. The research was conducted using a qualitative method, combining document studies, literature reviews, and analysis of relevant case law. The results show that Article 302 of the New National Criminal Code may lead to overcriminalization, as it regulates acts that can be considered part of freedom of expression and religion. This article can also be considered as limiting the right of individuals to choose their beliefs or religion, including the right not to have religious beliefs. In addition, this research highlights that this article is vulnerable to abuse by parties who have political interests or want to target specific groups. As a recommendation, this study suggests the need to reform the formulation of Article 302 of the National Criminal Code to reduce the impact of overcriminalization and protect human rights, such as freedom of speech.

Keywords: Overcriminalization; Religious Offenses; New Criminal Code; Indonesia

Mursyid Setiawan, Cecep Darmawan, Muradi, Syaifullah (*Program Studi Doktor Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia; Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran*)

(Strengthening Democratic Policing in the Perspective of Civic Education: A Conceptual Analysis)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 3, December 2023, page 217-234

One effort to strengthen the idea of democratic policing is through civic education. This research has the main aim of analyzing the conceptual aspects contained in civic education in order to provide strengthening ideas for democratic policing. This research also attempts to outline the challenges of democratic policing as viewed from the perspective of civic education in Indonesia. This article uses Gary Goertz's three-level conceptual analysis framework to dissect the conceptual dimensions in civic education that are useful for strengthening democratic policing. Qualitatively, data was obtained using literature studies from various books, journal articles, report documents, and other literature. This study shows that civic education, which is integrated with democracy, politics, law, human rights, anti-corruption, and peace education, can be a vehicle for conceptually strengthening the idea of democratic policing. In addition, this study found a number of challenges for civic education in strengthening democratic policing efforts in Indonesia. The main challenges are the problems that occur in the police institution, including not yet fully supporting democratic culture and spaces for citizens, the issue of police neutrality in political life, the practice of violations of law and human rights by police officers, the existence of corrupt behavior, and the fact that the police has not yet fully become a humanist and non-violent institution. This study requires further research to see to what extent the implementation of the concept of civic education can strengthen democratic policing efforts that are oriented to the citizenship dimension.

Keywords: civic education; conceptual analysis; democratic policing

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ellisa Vikalista, Hardi Warsono, Rina Martini, Dewi Erowati (*Doctoral Program in Social Sciences, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, Indonesia and Government Science Program, Faculty of Social and Political Science, Lambung Mangkurat University, Indonesia; Public Administration Department, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, Indonesia; Politics and Government Department, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, Indonesia*)

(Enhancing The Institutional Capacity of Political Parties to Achieve Affirmative Action in South Kalimantan)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 3, December 2023, page 235-250

Affirmative action is a program that promotes equal and equitable representation for the involvement and inclusion of women in politics and governance, based on the recognition that women's rights are part of broader human rights. This study's objective is to thoroughly examine the practical use of affirmative action in national and regional political spheres, with a particular emphasis on Southern Kalimantan, which exhibits both patriarchal cultural idiosyncrasies and societal openness. Moreover, the study examines whether providing focused political education to female cadres within the established political party structure can increase women's representation. This study selects samples from five branches of the DPD/DPW of prominent political parties identified as the top five vote-getters in the 2019 elections in South Kalimantan. The use of institutional theory is encompassed within the analytical approach. Utilizing a descriptive qualitative methodology, the process of selecting study participants involves purposive sampling, which includes primary and secondary data sources. The results of this study significantly contribute to the support and validation of affirmative action policies and improve access to women's representation by emphasizing the importance of institutional aspects inside political parties. Promoting political education for women cadres directly fulfils fundamental elements of women's political and human rights. This effort requires the courage and generosity of political parties to advocate for special political education to be included in the party's constitution as a formal legal basis and a long-term commitment to upholding affirmative action as a social obligation of political parties.

Keywords: affirmative action; political education; political party institution; women cadres

Ricky Santoso Muharam, Ari Pradhanawati, Fitriyah, Supratiwi (*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro*)

(Transgender Local Political Movement In The Struggle For The Right To Work)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 3, December 2023, page 251-266

The enactment of Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2014 concerning the Handling of Vagrants and Beggars has an impact on the waria (transgender) community of Yogyakarta. Most work as buskers and art workers reject the existence of the Gepeng Regional Regulation. This rejection was based on the fact that the waria community refused to be categorized as vagrants and beggars. Research using qualitative method with case studies. This research focuses on the strategy of the Yogyakarta transgender political movement by forming an advocacy coalition in response to the implementation of the Gepeng Regional Regulation, which is considered to impact the waria community working on the streets. The results of this study found that resistance or rejection actions were carried out in two ways. First, build a network of advocacy coalitions between communities. Second, Strategy through the media. The enactment of Perda Gepeng gave rise to two advocacy coalitions, namely the IWAYO, advocacy coalition which was formed as a result of the consolidation of several waria communities in Yogyakarta and the Gepeng Regional Caucus Coalition, consisting of various organizations, NGOs and various communities that support the struggle in rejecting the Gepeng Regional Regulation by trying to influence government decisions that are considered damaging democratic values and harming people experiencing poverty.

Keywords: transwomen; discrimination; local politics; local regulations; right to work

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Yayum Kumai (*Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada*)

(The Acts of Citizenship to Defend Trenggalek Civilians' Ecological Rights: An Ideological, Environmental, and Theological Analysis)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 3, December 2023, page 267-286

The background of this research aims to publish two reasons. First, to show a new perspective of common opinion about the social movement that is based on the class struggle. In this research, the environmental movement is run by the ecological ideology, spirituality, and theology motives. Second, the protests to reject the mining exploitation agenda are not to fight the state nor hinder the development agenda. However, these are the acts of citizenship as a part of participation in a democratic country. Based on the two points above, the research adapts two concepts those are the acts of citizenship from Engin Isin and humanistic Islam from Anna Gade. The data mining process uses ethnographic or observational participatory method that has done in the field of movement as become part of them. The discussion divides the actors of movement into three categories, two of them are Islamic-based organization and the left one is Javanese spiritual group. Each of them works on their own way to defend the ecological rights, but they all have the similar objectives of movement that is ecological sustainability. To develop the study of human rights movement in Indonesia, the approach of ethnography study needs to be deepened and doubled so that the local perspective about their own construction about rights could be mapped.

Keywords: *Muslim environmental movement; the acts of citizenship; ecological rights*

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Zico Junius Fernando, Sri Wulandari, Panca Sarjana Putra (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara)

Potensi Overkriminalisasi Dalam Tindak Pidana Agama: Analisis Kritis Terhadap Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 3, Desember 2023, hal. 205-216

Overkriminalisasi dalam konteks hukum pidana merujuk pada fenomena di mana terlalu banyak perilaku yang didefinisikan sebagai tindak pidana, yang pada akhirnya berakibat pada perluasan kewenangan penegak hukum dan peningkatan jumlah individu yang terjebak dalam sistem peradilan pidana. Studi ini mengkaji overkriminalisasi dalam perumusan tindak pidana agama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan fokus pada Pasal 302 tentang penghasutan agar seseorang tidak menganut agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dan dampaknya terhadap komunitas ateis atau non-agama. Analisis ini menyoroti beberapa isu penting, seperti ketidakjelasan definisi "menghasut" dalam pasal tersebut, dampaknya terhadap kebebasan berpendapat, potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan penyalahgunaan hukum untuk tujuan politik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggabungkan studi dokumen, tinjauan literatur, dan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 302 KUHP Baru dapat menyebabkan overkriminalisasi, karena pasal ini mengatur tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan beragama. Pasal ini juga dapat dianggap membatasi hak individu untuk memilih keyakinan atau agama mereka, termasuk hak untuk tidak memiliki keyakinan agama. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa pasal ini rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau ingin menyasar kelompok tertentu. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi perumusan Pasal 302 KUHP untuk mengurangi dampak overkriminalisasi dan melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat.

Kata Kunci: Overkriminalisasi; Pelanggaran Agama; KUHP Baru; Indonesia

Mursyid Setiawan, Cecep Darmawan, Muradi, Syaifullah (Program Studi Doktor Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia; Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)

Penguatan Pemolisian Demokratis dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Analisis Konseptual

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 3, Desember 2023, hal. 217-234

Salah satu upaya untuk memperkuat gagasan pemolisian demokratis ialah melalui pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini memiliki tujuan utama yakni menganalisis aspek-aspek konseptual yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan guna memberikan gagasan penguatan bagi pemolisian demokratis. Penelitian ini pun berupaya menguraikan tantangan pemolisian demokratis yang ditinjau dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Artikel ini menggunakan kerangka analisis konseptual tiga tingkat dari Gary Goertz, guna membedah dimensi konseptual dalam pendidikan kewarganegaraan yang berguna bagi penguatan pemolisian demokratis. Secara kualitatif, data diperoleh dengan menggunakan studi literatur dari berbagai buku, artikel jurnal, dan dokumen laporan-laporan serta literatur lainya. Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian, dapat menjadi wahana untuk memperkuat gagasan pemolisian demokratis secara konseptual. Selain itu, studi ini menemukan sejumlah tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat upaya pemolisian demokratis di Indonesia. Tantangan utamanya ialah adanya problematika yang terjadi di institusi kepolisian meliputi belum sepenuhnya mendukung budaya dan ruang-ruang demokrasi bagi warga negara, isu netralitas kepolisian dalam kehidupan politik, terjadinya praktik pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh oknum kepolisian, masih adanya perilaku koruptif, dan kepolisian belum sepenuhnya menjadi lembaga yang humanis dan antikekerasan. Studi ini membutuhkan penelitian lebih lanjut guna melihat sejauh mana implementasi konsep pendidikan kewarganegaraan yang dapat memperkuat upaya pemolisian demokratis yang berorientasi pada dimensi kewargaan.

Kata Kunci: analisis konseptual; pemolisian demokratis; pendidikan kewarganegaraan

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Ellisa Vikalista, Hardi Warsono, Rina Martini, Dewi Erowati (Doctoral Program in Social Sciences, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, Indonesia and Government Science Program, Faculty of Social and Political Science, Lambung Mangkurat University, Indonesia; Public Administration Department, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, Indonesia; Politics and Government Department, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, Indonesia)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik untuk Mewujudkan Tindakan Afirmatif di Kalimantan Selatan

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 3, Desember 2023, hal. 235-250

Tindakan afirmatif adalah program yang ditargetkan untuk mempromosikan representasi yang setara dan adil untuk keterlibatan dan penyertaan perempuan dalam politik dan pemerintahan, berdasarkan pengakuan bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan praktis tindakan afirmatif di bidang politik nasional dan regional, dengan fokus khusus pada Provinsi Kalimantan Selatan, yang menampilkan idiosinkrasi budaya patriarki dan keterbukaan sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pertanyaan mendasar tentang apakah pemberian pendidikan politik yang terfokus kepada kader perempuan, di dalam struktur partai politik yang sudah mapan, dapat menghasilkan peningkatan tingkat keterwakilan perempuan. Penelitian ini memilih sampel dari lima cabang DPD/DPW partai politik terkemuka, yang diidentifikasi sebagai lima peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di wilayah tersebut. Penggunaan teori kelembagaan tercakup dalam pendekatan analisis. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, proses pemilihan partisipan penelitian dilakukan secara purposive sampling, yang mencakup sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini secara signifikan berkontribusi dalam mendukung dan memvalidasi kebijakan tindakan afirmatif dan meningkatkan capaian keterwakilan perempuan, terutama dengan menekankan pentingnya aspek kelembagaan di dalam partai politik. Dengan mendorong pendidikan politik bagi kader perempuan, hal ini secara langsung memenuhi aspek fundamental hak asasi politik perempuan. Upaya ini membutuhkan keberanian dan kemurahan hati partai politik untuk mengadvokasi pendidikan politik khusus perempuan untuk dimasukkan ke dalam AD/ART partai sebagai dasar hukum formal dan komitmen jangka panjang untuk menegakkan tindakan afirmatif sebagai kewajiban sosial partai politik.

Kata Kunci: kader perempuan; kelembagaan partai politik; pendidikan politik; tindakan afirmatif

Ricky Santoso Muharam, Ari Pradhanawati, Fitriyah, Supratiwi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro)

Gerakan Politik Lokal Waria dalam Perjuangan Hak Bekerja

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 3, Desember 2023, hal. 251-266

Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis memberikan dampak terhadap komunitas waria Yogyakarta. Para waria yang sebagian besar bekerja sebagai pengamen dan pekerja seni menolak adanya Perda Gepeng tersebut. Penolakan ini didasari karena komunitas waria menolak dikategorikan sebagai gelandangan dan pengemis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini memfokuskan terhadap strategi gerakan politik waria Yogyakarta dengan membentuk koalisi advokasi dalam merespons pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap berdampak kepada komunitas waria yang bekerja di jalanan. Hasil penelitian ini menemukan dalam melakukan aksi perlawanan atau penolakan dilakukan melalui dua cara. Pertama, membangun jaringan koalisi advokasi antar komunitas. Kedua, melakukan strategi advokasi melalui media. Pemberlakuan Perda Gepeng memunculkan dua koalisi advokasi yakni koalisi advokasi IWAYO yang merupakan hasil konsolidasi dari beberapa komunitas waria di Yogyakarta dan Koalisi kaukus Perda Gepeng yang terdiri dari berbagai organisasi, LSM dan berbagai komunitas yang mendukung perjuangan dalam penolakan Perda Gepeng dengan berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah yang dianggap merusak nilai demokratis dan merugikan kelompok miskin.

Kata Kunci: waria; diskriminasi; politik lokal; perda gepeng; hak bekerja

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Yayum Kumai (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada)

Aksi Kewargaan Membela Hak Ekologi Warga Trenggalek: Analisis Ideologis, Lingkungan, dan Teologis

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 3, Desember 2023, hal. 267-286

Penelitian ini dilatarbelakangi dan bertujuan atas dua hal. Pertama, menunjukkan hal baru dari pandangan umum yang menganggap bahwa gerakan-gerakan menolak pembangunan pemerintah hanya dilandasi alasan ekonomi daripada ideologi lingkungan, spiritualitas, dan teologi. Kedua, aksi-aksi protes ini bukan untuk melawan negara dan menghambat rencana pembangunan, tetapi ini merupakan aksi kewargaan dalam sistem demokrasi. Berdasarkan dua poin di atas, penelitian ini meminjam konsep aksi kewargaan dari Engin Isin dan humanisme Islam dari Anna Gade. Pengambilan datanya dilakukan memakai metode observasi partisipatif dengan terjun langsung menjadi bagian dari anggota gerakan lingkungan. Pembahasan dalam penelitian dilakukan dengan membedah dua organisasi Islam dan satu kelompok spiritual sebagai pelaku dari aksi kewargaan. Masing-masing dari ketiganya menunjukkan cara perjuangan hak lingkungan yang berbeda namun punya tujuan serupa bagi keberlanjutan ekologi. Pembacaan gerakan perjuangan hak asasi manusia menggunakan pendekatan etnografis perlu diperdalam dan diperbanyak supaya perspektif lokal dapat muncul ke permukaan.

Kata Kunci: gerakan lingkungan Muslim; aksi kewargaan; hak ekologi